

**Analisis Pendapatan Untuk Menilai Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara**

**Oby Remanta, Feronika Sarah Putri Nababan, Romauli L. Toruan, Nur Aisyah,
Oktarini Khamilah Siregar**

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
e-mail: obytrg02@gmail.com

Abstract

Revenue is a key element in financial statements that reflects the financial performance of an entity. This study aims to investigate the effect of revenue variations on financial performance evaluation, focusing on the public sector. The research method involves historical and comparative data analysis against industry standards and best practices. The results of the analysis show the relationship between revenue structure and financial performance, as well as the implications of revenue changes on financial stability and public policy. These findings provide valuable insights for decision makers, regulators, and researchers to improve revenue management strategies and enhance the quality of public sector financial reports. To overcome the challenges of high financial dependence and increase the independence of Central Tapanuli Regency, comprehensive strategic steps are needed. First, the region needs to develop a revenue diversification strategy by utilizing local economic potentials such as tourism, agriculture, and small and medium industries. Second, optimization of local revenue management (PAD) must be focused on improving tax collection and improving financial management.

Keywords: Revenue, Financial Report, Financial Performance

Abstrak

Pendapatan adalah elemen kunci dalam laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh variasi pendapatan terhadap evaluasi kinerja keuangan, dengan fokus pada sektor publik. Metode penelitian melibatkan analisis data historis dan komparatif terhadap standar industri dan praktik terbaik. Hasil analisis menunjukkan hubungan antara struktur pendapatan dan kinerja keuangan, serta implikasi dari perubahan pendapatan terhadap stabilitas keuangan dan kebijakan publik. Penemuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan, regulator, dan peneliti untuk memperbaiki strategi manajemen pendapatan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik. Untuk mengatasi tantangan ketergantungan keuangan yang tinggi dan meningkatkan kemandirian Kabupaten Tapanuli Tengah, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, daerah perlu mengembangkan strategi diversifikasi pendapatan dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan industri kecil-menengah. Kedua, optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) harus difokuskan melalui perbaikan dalam pemungutan pajak dan peningkatan manajemen keuangan.

Kata Kunci: Pendapatan, Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi. Analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk menilai kinerja laporan keuangan, yang terdiri dari komponen seperti realisasi anggaran, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan, transaksi, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Salah satu aspek krusial dalam evaluasi ini adalah tingkat kemandirian finansial daerah, yang tercermin dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan mengelola sumber daya secara efisien. Pendapatan daerah bukan hanya indikator kemandirian, tetapi juga dasar bagi strategi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendapatan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga daerah dapat mengontrol keuangannya dengan lebih baik.

Penggunaan teknologi informasi menjadi elemen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi keuangan yang baik memperkuat akuntabilitas publik dan melindungi integritas dana publik dari potensi penyalahgunaan. Namun, tantangan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi hambatan dalam penerapan teknologi ini secara efektif. Dukungan dari pemerintah pusat dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan semua daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan harus diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi lokal. Daerah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur, mendorong investasi sektor swasta, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan dana, serta implementasi kebijakan pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mendukung tujuan pembangunan lokal yang berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sosial. Evaluasi pendapatan daerah menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan ini, sehingga alokasi dana dapat tepat sasaran dan efisien.

Tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik di pemerintah daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas. Banyak daerah menghadapi kendala karena kurangnya tenaga ahli yang memadai. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta kerja sama antar-daerah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Globalisasi dan perubahan iklim juga berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Perubahan pasar global dapat mempengaruhi potensi pendapatan dari sektor ekspor atau industri tertentu, sementara perubahan iklim dapat mempengaruhi sektor seperti pertanian atau pariwisata. Daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merancang kebijakan yang mengurangi risiko ekonomi terkait perubahan global dan iklim.

Evaluasi pendapatan daerah menjadi penting sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. Dengan diversifikasi sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan nasional, menciptakan daerah yang lebih stabil, berkelanjutan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Hafni (2017) menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu pada Tahun Anggaran 2011-2013 berada dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah sangat efektif pada tahun 2011-2012, tetapi tidak efektif pada tahun 2013. Sedangkan efisiensi keuangan daerah sangat

efisien. Dilihat dari rasio belanja aktivitas pada periode 2011-2012, Kabupaten Labuhan Batu masih memprioritaskan pengeluaran rutin dibanding belanja modal. Selain itu, pertumbuhan pendapatan daerah cenderung menurun dan negatif pada tahun 2013. Namun, Pemkab Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena memiliki DSCR di atas 250% setiap tahunnya. Sementara itu, Sumual, Kalangi, & Gerungai (2017) menyimpulkan bahwa selama tahun 2013-2016 Kota Tomohon hanya mendapatkan predikat sebagai Kota yang efektif karena banyak target yang telah dicapai. Namun, pertumbuhan kemandirian dan efisiensi Kota Tomohon belum memenuhi standar yang diinginkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang mengukur kinerja pemerintah daerah menggunakan berbagai rasio, termasuk derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang digunakan, yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan memilih Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karena kabupaten ini merupakan salah satu pemerintah daerah yang sudah lama berdiri dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi keuangan daerah yang cukup tinggi dan diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menunjang pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pengukuran Kinerja

Kinerja (performance) adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan oleh individu dan organisasi dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam strategi atau perencanaan organisasi. Konsep Pengukuran Kinerja Keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur disebut kinerja keuangan pemerintah daerah. Efektivitas pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan daerah E. J. Harahap, dalam Daim et al., (2023).

Kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap tingkat likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, stabilitas, dan fleksibilitas perusahaan. Evaluasi ini penting dalam membuat keputusan strategis mengenai aset perusahaan serta sebagai titik tolak untuk meramalkan perubahan masa depan dalam sumber daya ekonomi yang dapat dikontrol. Informasi ini diperlukan untuk memahami kinerja keseluruhan unit bisnis dan menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang krusial terkait dengan aset perusahaan.

Rasio Terkait Kinerja Keuangan Pemerintah

Rasio-rasio yang terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai aspek pengelolaan keuangan di tingkat lokal:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Derajat Desentralisasi = $\text{Pad} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$

Tabel 1
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi	Keterangan
0,00 -10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Tabel 2
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

RRKD	Keterangan
0,00 -10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \text{Realisasi Penerimaan PAD} / \text{Target Penerimaan} \times 100\%$$

Tabel 3
Nilai Efektifitas

Efektifitas	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Harahap, H. F. (2020)

METODE

Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu kerangka sistematis yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap masalah tertentu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 2016-2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu dari 33 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terletak di kawasan pantai barat

Sumatera Utara dengan koordinat geografis 1°11'00" – 2°22'00" LU dan 98°07' – 98°12' BT. Wilayahnya memiliki luas sebesar 6.194,98 km², dengan sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sisanya terdiri dari 31 pulau kecil yang menawarkan pemandangan alam yang mempesona, dengan garis pantai sepanjang ± 200 km. Ibu kota kabupaten ini adalah Pandan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 kecamatan dan 215 desa/kelurahan, dengan lanskap yang meliputi gunung, pantai, laut, dan sungai, sering disebut sebagai "GUPALA".

Rasio Derajat Desentralisasi merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat desentralisasi ini dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

Tabel 1
Perbandingan antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total
Penerimaan Daerah.

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Derajat (%)	Keterangan
2016	71.758.981.995	1.069.165.690.561	6,71	Sangat Rendah
2017	72.710.308.590	1.094.002.131.630	6,65	Sangat Rendah
2018	76.660.883.410	1.216.899.572.344	6,29	Sangat Rendah
Rata - rata			6,55	Sangat Rendah

Sumber : Harahap, H. F. (2020)

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diamati bahwa pada tahun 2016, tingkat desentralisasi keuangan sebesar 6,71%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 6,65% pada tahun 2017 dan 6,29% pada tahun 2018 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini menunjukkan penurunan dalam derajat desentralisasi dari tahun ke tahun. Rata-rata derajat desentralisasi selama 3 tahun tersebut adalah 6,55%, yang dikategorikan rendah berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

Namun demikian, temuan ini bertentangan dengan teori Mahmudi (2016) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk mendukung keuangan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Berikut adalah hasil perhitungannya:

Tabel 2
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	KKD (%)	Keterangan
2016	1.009.291.823.040	1.069.165.690.561	94,40	Sangat Tinggi
2017	1.028.442.721.000	1.094.002.131.630	94,01	Sangat Tinggi
2018	1.140.238.688.934	1.216.899.572.344	93,70	Sangat Tinggi
Rata - rata			94,03	Sangat Tinggi

Sumber : Harahap, H. F. (2020)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dari 94,40% pada tahun 2016 menjadi 94,01% pada tahun 2017, dan kemudian turun lagi menjadi 93,70% pada tahun 2018. Rata-rata tingkat

ketergantungan selama periode 2016-2018 adalah 94,03%, yang menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 diklasifikasikan sebagai sangat tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi masih sangat dominan dalam mendukung keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori Halim & Kusufi dalam Faisal Harahap (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Hafni (2017), Kabupaten Labuhan Batu mengalami fluktuasi dalam efektivitas keuangan dan kemandirian yang rendah, Sementara pada kabupaten Tapanuli Tengah menghadapi tantangan struktural yang mencakup rendahnya desentralisasi keuangan dan ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat/provinsi. Kedua daerah membutuhkan langkah-langkah yang berbeda dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, termasuk penguatan kapasitas SDM, kolaborasi antar-daerah, serta peningkatan monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Rasio Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan PAD. Perhitungan rasio ini terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2016	71.758.981.995	64.005.291.000	112,11	Sangat Efektif
2017	72.710.308.590	82.981.335.879	87,62	Kurang Efektif
2018	76.660.883.410	100.000.000.000	76,66	Kurang Efektif
Rata - rata			92.13	Cukup Efektif

Sumber :Harahap, H. F. (2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kinerja keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa daerah ini menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai kemandirian keuangan, terutama karena tingkat derajat desentralisasi keuangan yang rendah dan ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), seperti diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pengelolaan PAD, implementasi kebijakan yang lebih efektif dan strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi antar-daerah, serta peningkatan dalam monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk mengarahkan Kabupaten Tapanuli Tengah menuju keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Atas Kesimpulan tersebut, maka adapun saran yang bisa diberikan yakni :

Untuk mengatasi tantangan ketergantungan keuangan yang tinggi dan meningkatkan kemandirian Kabupaten Tapanuli Tengah, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, daerah perlu mengembangkan strategi diversifikasi pendapatan dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan industri kecil-menengah. Kedua, optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) harus difokuskan melalui perbaikan dalam pemungutan pajak dan peningkatan manajemen keuangan. Selanjutnya, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan dan manajemen publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan daerah secara efektif. Kolaborasi antar-daerah dan adopsi praktik terbaik dari daerah lain yang berhasil juga dapat mendukung upaya ini. Terakhir, perlu ditetapkan mekanisme monitor dan evaluasi yang rutin guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan program pembangunan, serta untuk melakukan koreksi yang diperlukan demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Dewi, A. D., & Hafni, M. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2), 1-11.
- Harahap, H. F. (2020). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2018. *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45-58.
- Kusuma, A., & Hartadi, B. (2019). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1-12.
- Daim, S., et al. (2023). Evaluasi Efektivitas Pengabdian Masyarakat dalam Konteks Pengelolaan APBD. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 112-125.
- Mahmudi. (2016). *Teori Desentralisasi Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Halim, A., & Kusufi, A. (2018). Ketergantungan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 78-91.
- Sumual, S. T., Kalangi, E. V., & Gerungai, S. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2013-2016. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 78-88.
- Zuhrohtun, S., & Hidayat, R. (2020). Evaluasi Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 335-350.
- Asmara, A., & Anggreni, L. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 151-160.
- Rahmawati, S., & Alamsyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 251-268.
- Raharja, A., & Faradina, F. (2018). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 24(3), 327-340.